Journal of Internasional Multidisciplinary Research

Implikasi Globalisasi Dan Kemiskinan di Indonesia

Sabri[1], Kuliman[2], Eka Febrianti[3], Asnah[4]
[1,2,3,4]Institut Teknologi dan Bisnis Haji Agus Salim Bukit tinggi
sabrisimabur@gmail.com

Informasi Artikel
E-ISSN : 3026-6874,
Vol: 2, No: 1, Januari 2024
Halaman :145-154

Abstract
Poverty is a problem faced by many developing countries, poverty is a common phenomenon that is almost found in various countries, both developing and developed countries where the only difference is the intensity and proportion in each country. Poverty is something that cannot be avoided by almost all countries in the world. Poverty is suffering, trials, and tests, and is a life problem that desperately needs a solution. The solution is not only for the poor themselves, but also for the wealthy who are given sufficient life to earn, give and give alms to the needy and poor as a group that does not have luck in terms of economic adequacy.Various poverty reduction efforts have been carried out by the Indonesian government in order to bring the poor out of poverty due to the crisis, such as through quality economic growth, increasing access to basic needs such as education and health, community empowerment through the National Program for Community Empowerment (PNPM) which aims to open opportunities for the poor to participate in the development process and increase the opportunities and bargaining position of the poor, as well as improving the social assistance and security system through the Family Hope Program (PKH). Based on these problems, the author wants to discuss the implications of globalization and poverty in Indonesia.

Keywords:
Implications
Globalization
Poverty

Abstrak
Kemiskinan merupakan masalah yang dihadapi oleh banyak negara berkembang, kemiskinan merupakan fenomena umum yang hampir ditemukan di berbagai negara baik negara berkembang maupun negara maju dimana yang membedakan hanyalah intensitas dan proporsinya di masing-masing negara. Kemiskinan merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari oleh hampir semua negara di dunia. Kemiskinan adalah penderitaan, cobaan, dan ujian, dan merupakan masalah hidup yang sangat membutuhkan solusi. Solusinya bukan hanya bagi orang miskin itu sendiri, tetapi juga bagi orang kaya yang diberi kehidupan yang cukup untuk mencari nafkah, memberi dan memberi sedekah kepada yang membutuhkan dan miskin sebagai kelompok yang tidak beruntung dalam hal kecukupan ekonomi. Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka membawa masyarakat miskin keluar dari kemiskinan akibat krisis, seperti melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional. Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang bertujuan untuk membuka peluang masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan dan meningkatkan peluang dan posisi tawar masyarakat miskin, serta meningkatkan sistem bantuan dan jaminan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis ingin membahas implikasi globalisasi dan kemiskinan di Indonesia.

Kata Kunci: Implikasi, Globalisasi, Kemiskinan

PENDAHULUAN

Globalisasi dan liberalisasi pasar telah terjadi dan dialami Indonesia sejak pedagang Eropa melakukan kontak dagang dengan kerajaan-kerajaan di kepulauan Nusantara. Kemudian memunculkan penjajahan (kolonial) dan membawa implikasi cukup penting bagi kesejahteraan masyarakat. Peluang kerja memang terbuka karena investasi mengalir cukup deras. Namun, tanah-tanah masyarakat dikuasai oleh pengusaha asing dengan sewa jangka panjang atau dikuasai secara semena-mena. Masyarakat terusir dari tanahnya dan kehilangan alat produksi utama. Untuk mereguk keuntungan, para pengusaha asing memperkerjakan masyarakat lokal dengan upah rendah. Walaupun terintegrasi dengan pasar dunia, kesejahteraan masyarakat lokal tidak berubah karena pasar sepenuhnya dikuasai para pedagang asing yang menguasai teknologi, alat komunikasi dan transportasi. Ada perubahan tetapi tidak ada implikasi bagi perbaikan kesejahteraan, justru kemiskinan meluas.

Globalisasi yang terjadi pada abad 21 ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan globalisasi pada abad 19. Kalau dulu pasar dikuasai negara maju (kapitalis) dengan menduduki (dijajah) sekarang dibungkus dengan *mission sacree* diselimuti diplomasi politik dengan taktik lehih halus. Dibalik itu hakekat hasrat negara-negara maju berusaha menguasai dan sebagai mencari jalan (strategi) untuk melipat gandakan keuntungan tidaklah berbeda. Mungkin saja peluang-peluang usaha tercipta, tetapi lebih banyak dinikmati mereka yang telah menyiapkan diri untuk berkompetisi. Tidak semua negara dan lapisan masyarakat bisa menikmati peluang yang tercipta dalam era globalisasi. Implikasi bagi penganggulangan kemiskikan tentunya tergantung pada masyarakat lokal dalam menyikapi globalisasi itu. Setidaknya masyarakat perlu mempertimbangkan menerima atau menyetujui bila globalisasi dapat menguntungkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Perlu menolak dengan tegas bila globalisasi tidak mempunyai implikasi bagi peningkatan kesejahteraan dan menghambat penanggulangan kemiskinan sehingga persentase masyarakat miskin menjadi bertambah.

Globalisasi dapat dimaknai sebagai proses integrasi dunia disertai dengan ekspansi pasar (barang dan uang) yang di dalamnya mengandung banyak implikasi bagi kehidupan manusia. Integrasi dunia dapat memicu pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengurangi kesenjangan dan kemiskinan melalui effek ganda (*multiplier effects)* perluasan peluang kerja dan peningkatan upah real. Bagi negara maju karena ketersediaan dukungan berbagai keunggulan, barangkali hipotesis itu dapat menjadi kenyataan. Bagi kebanyakan negara berkembang seperti Indonesai dengan berbagai macam kondisi keterbelakangan merasa khawatir bahwa integrasi dunia hanya menguntungkan pemilik modal (negara-negara maju) dan menimbulkan malapetaka bagi negara-negara berkembang tidak terkecuali bagi Negara Indonesia. Masyarakat miskin yang merupakan mayoritas penduduk negara Indonesai mungkin tidak dapat menikmati peluang-peluang yang tercipta dan bahkan terpaksa tersisih dan terjerembab dalam pusaran kemiskinan dikarenakan rata-rata mata pencahariannya hidup sebagai petani.

Bagi Indonesia, kemiskinan sudah sejak lama menjadi persoalan, di mana hingga sekarang masih belum menunjukan tanda-tanda berakhir ditambah lagi dengan masih belum berakhirnya wabah virus Covid-19 yang sudah masuk tahun ke 2. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan BPS, jumlah penduduk miskin pada September 2021 sebesar 26,50 juta orang, menurun 1,04 juta orang terhadap Maret 2021 dan menurun 1,05 juta orang terhadap September 2020. Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2021 berdasarkan data survey tersebut dari 7,89%, turun menjadi 7,60 persen pada September 2021(Rahman et al., 2022). Kondisi masyarakat yang hidup dalam kungkungan kemiskinan pada umumnya menderita kekurangan gizi, tingkat kesehatan yang buruk, tingkat buta huruf yang tinggi, lingkungan yang buruk dan ketiadaan akses infrastruktur maupun pelayanan publik yang memadai.

Berbagai upaya penanggulangan kemiskinan terus dilakukan pemerintah Indonesia demi untuk mengeluarkan penduduk miskin dari jurang kemiskinan akibat krisis, seperti melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, peningkatan akses terhadap kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan masyarakat lewat Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang bertujuan untuk membuka kesempatan berpartisipasi bagi masyarakat miskin dalam proses pembangunan dan meningkatkan peluang dan posisi tawar masyarakat miskin, serta perbaikan sistem bantuan dan jaminan sosial lewat Program Keluarga Harapan (PKH). Berdasasrkan permasalahan tersebut, penulis ingin membahas mengenai Implikasi Globalisasi dan kemiskinan di Indonesia.

Penelitian ini membahas implikasi globalisasi pada beberapa aspek kehidupan, terutama kemiskinan. Atas dasar itu, kemudian diusahakan untuk menelaah apakah globalisasi dapat membuka peluang atau justru menghambat upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Bahasan dalam peper ini difokuskan pada aspek-aspek yang terkait dengan implikasai globalisasi dan kemiskinan di Indonesia. Pada bagian akhir dibahas implikasi pada upaya penanggulangan kemiskinan.

METODE

Penelitian ini akan mengadopsi metode kualitatif dengan menggunakan sumber data pustaka untuk menganalisis implikasi globalisasi terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia. Pendekatan ini

memungkinkan peneliti untuk menggali pemahaman mendalam melalui telaah literatur dari berbagai sumber ilmiah, jurnal, dan laporan penelitian yang relevan. Dengan mengkombinasikan penelitian sebelumnya, pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pandangan komprehensif terkait dampak globalisasi terhadap kondisi kemiskinan di Indonesia.

Langkah pertama dalam metode ini adalah menentukan fokus penelitian dengan merinci variabel-variabel terkait globalisasi dan kemiskinan yang akan dianalisis. Melalui kajian literatur, peneliti akan mengidentifikasi pendekatan-pendekatan konseptual dan metodologis yang digunakan oleh peneliti sebelumnya, serta mencari kesenjangan pengetahuan yang mungkin perlu ditutup.

Analisis kritis terhadap literatur-literatur yang relevan akan dilakukan untuk mengidentifikasi pola, temuan utama, dan konsep-konsep kunci yang berkaitan dengan implikasi globalisasi terhadap kemiskinan di Indonesia. Sumber data pustaka ini akan mencakup pemahaman tentang bagaimana faktor-faktor seperti liberalisasi perdagangan, investasi asing, dan integrasi ekonomi global memengaruhi distribusi kekayaan dan tingkat kemiskinan di negara ini.

Sintesis temuan dari literatur-literatur tersebut akan dilakukan untuk membentuk kerangka konseptual yang dapat digunakan sebagai dasar untuk memahami dan menginterpretasikan implikasi globalisasi terhadap kemiskinan di Indonesia. Dengan memadukan kontribusi literatur-litur tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam dan beragam terkait dengan topik tersebut, serta mengidentifikasi arah penelitian yang lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Globalisasi

Globalisasi telah menjadi istilah populer. Ada harapan terselip padanya karena menjanjikankan peluang-peluang. Ada kala memunculkan ketakutan dan menghantui beberapa negara-negara yang ada di dunia karena membawa dampak buruk bagi perekonomian suatu Negara. Realitas menunjukkan bahwa istilah itu dengan berbagai macam penafsiran telah menjadi isu dan pembicaraan di mana-mana. Terlepas dari segala macam penafsiran, globalisasi merupakan sebuah proses yang kompleks. Karena globalisasi digerakkan oleh berbagai kekuatan, baik budaya, teknologi, politis maupun ekonomi. Tidak mengherankan bila kemudian globalisasi dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Globalisasi tidak hanya merubah kehidupan sehari-hari tetapi juga menciptakan kekuatan-kekuatan Internasional baru. Bahkan disadari atau tidak, globalisasi telah mentranformasikan ruang dan waktu serta institusi-institusi, baik sosial maupun ekonomi serta dampak lain yang dirasakan oleh negara-negara berkembang (Nur et al., 2022).

Globalisasi adalah terminologi baru tetapi eksistensinya telah ada sejak lama. Gejala itu muncul sejak petualang pedagang Eropa mejelajahi dunia. Era merkantilis pertengahan abad 19 dengan dukungan transportasi laut boleh dikatakan sebagai awal globalisasi abad 19. Saat itu perdagangan dan perekonomian dunia sudah terbuka dan dikuasai pedagang Eropa (negara maju). Jalur perdagangan dan pasar dunia dikuasai dan dimonopoli pedagang Eropa. Monopoli tidak hanya melalui diplomasi tetapi diusahakan melalui kekerasan (peperangan) dalam upaya menundukkan dan hasrat menguasai kerajaan-kerajaan di Asia, Afrika, Amerika Latin untuk dijadikan daerah jajahan demi kepentingan perdagangan (sumber bahan mentah dan pasar). Ketika itu muncul koloni-koloni yang sudah dikuasai sehingga dengan mudah untuk dikontrol aktivitas perdagangannya. Dengan demikian keuntungan para pedagang dapat dilipat gandakan dan negara bisa mengambil keuntungan untuk membiaya pembangunan di negara asal.

Globalisasi abad 19 dengan abad 21 ini berbeda, perbedaan terletak pada pendekatan serta model yang dipakai dalam penguasaan dan dalam hal kecepatan serta cakupan. Penguasaan pasar dan perdagangan tidak lagi dengan menguasai secara fisik, seperti abad 19, tetapi melalui pendekatan dengan menggunakan instrumen politik, budaya dan teknologi. Negara-negara maju dan para pemilik modal berskala internasional tidak perlu bersusah payah dan berlama-lama diperjalanan untuk melakukan transaksi perdagangan. Melalui kerjasama kelompok dalam pasaran bersama, ekpansi pasar dapat dilakukan. Kerjasama pemasaran diorganisir dan berdasarkan kesepakatan politis dibentuk forum seperti AFTA (Munir & Ilham, 2022) Melalui forum itu dilakukan perjanjian mengenai hak dan kewajiban masing-masing anggota dalam mewujudkan ekspansi dan penguasaan pasar. Negara yang

mempunyai kekuatan lobi politis cenderung lebih diuntungkan ketimbang negara yang lobi politis lemah. Secara politis negara-negara maju yang mempunyai lobi politis lebih kuat pasti banyak menguasai dan diuntungkan dengan liberalisasi ekonomi dalam era globalisasi abad ini.

Penguasaan pasar bisa juga dilakukan lewat media teknologi. Menggunakan teknologi komunikasi mutakhir negara-negara maju dengan mudah melakukan transaksi perdagangan menembus batas-batas negara dalam waktu sangat cepat dan singkat. Integrasi ekonomi menuju pada perekonomian sepenuhnya global melampaui dan tanpa ada batas-batas negara. Teknologi mempercepat proses intergrasi dan dengan sekejap mata dapat mempengaruhi masyarakat dunia di mana pun berada. Informasi dengan mudah menyebar keseluruh dunia tanpa ada yang bisa mengontrolnya. Siapa saja yang mempunyai akses dan mengusasai teknologi komunikasi mutakhir, di mana pun dia berada dengan mudah dan leluasa berinteraksi dengan dunia. Apapun transaksi yang dilakukan dapat dengan mudah tanpa perlu bersusah payah. Dunia semakin terbuka dan dengan segala macam implikasinya.

b. Kemiskinan dan Kesenjangan Pendapatan

1. Permasalahan pokok

Dua masalah besar makro ekonomi yang di hadapi oleh Indonesia, kesenjangan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Menjelang akhir dekade 1970-an, pemerintah sudah menyadari buruknya kualitas pembangunan yang dihasilkan. Maka dari itu strategi pembangunan diubah, tak lagi hanya terfokus pada pertumbuhan ekonomi. Tapi juga peningkatan kesejah teraan masyarakat menjadi tujuan utama pembangunan. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yaitu dengan program-program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Program tersebut antara lain adalah Inpres Desa Tertinggal (IDT), pengembangan industri kecil dan rumah tangga, transmigrasi, pelatihan/ pendidikan (Sodik, 2022).

Indonesia sering mengalami krisis ekonomi, yang diawali krisis nilai tukar rupiah dan salah satu akibatnya adalah jumlah orang miskin dan perbedaan (gap) dalam distribusi pendapatan ditanah air membesar, bahkan jauh lebih buruk dibanding sebelum krisis. Hal ini dapat dilihat dari kondisi buruk yang dialami oleh masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan.

2. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan

Ada suatu korelasi positif antara laju pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kesenjangan dalam distribusi pendapatan dimana, semakin tinggi pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) atau semakin besar pendapatan perkapita semakin besar perbedaan antara rakyat miskin dan yang kaya. Jantti (1997) dalam studinya membuat suatu kesimpulan bahwa semakin membesarnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan di Indonesai dikarnakan adanya pergeseran-pergeseran demografi serta perubahan kebijakan-kebijakan publik.(Idris et al., 2014)

Hal ini dapat dilihat dari daerah pedesaan yang ada di Indonesai yang sangat padat penduduknya mengakibatkan tingkat upah disektor pertanian sangat rendah dan membuat suplai tenaga kerja dari pertanian ke industry tidak bisa dikarenakan tingkat pendidikan mereka masih rendah. Proses perpindahan tenaga kerja yang berasal dari pertanian telah diserap oleh industry tidak seberapa. Hasil ini diinterpretasikan sebagai evolusi dari distribusi pendapatan dalam proses transisi dari suatu ekonomi pedesaan ke ekonomi perkotaan. Pada awal proses pembangunan, ketimpangan pendapatan bertambah besar sebagai akibat dari proses urbanisasi dan industrialisai, tetapi setelah itu pada tingkat pembangunan yang lebih merata antara kota dengan desa maka ketimpangan akan menurun, yaitu pada saat sektor industry di perkotaan sudah dapat menyerap sebagian besar dari tenaga kerja yang datang dari pedesaan (sector pertanian), atau pada saat pangsa pasar pertanian lebih kecil didalam produksi dan penciptaan pendapatan. Maka disinilah perlunya invesatasi yang berasal dari luar negeri untuk membangun sector industry yang ada di Indonesai yang kekurangan modal.

3. Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Dasar teori dari korelasi antara pertumbuhan pendapatan perkapita dan tingkat kemiskinan tidak berbeda dengan kasus pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan dalam distribusi pendapatan.

Di tahap awal dari proses pembangunan, tingkat kemiskinan cenderung meningkat, dan pada saat mendekati tahap akhir dari pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang hal ini harus didukung oleh derajat pendidikan yang tinggi serta tenaga kerja yang rampil dan diidukung oleh struktur ekonomi yang pro raknyat bukan pro pemilik modal saja..

Pendekatan pertama, terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan harus memfokuskan pada keyakinan bahwa orang-orang miskin pasti mendapatkan keuntungan dari pertumbuhan ekonomi walaupun tidak proposional. Pendekatan kedua, fokus pada percepatan laju petumbuhan pendapatan dari kelompok miskin lewat pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dan dengan memperbesar kesempatan bagi rakyat miskin untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan, yang hasilnya memperbesar laju penurunan kemiskinan. Hal ini harus dilakukan pemerintah dengan meninggikan derajat pendidikan, memberikan fasilitas kesehatan serta membuka peluang untuk pinjaman modal (Hasan & Azis, 2018)

Hasil-hasil dari sejumlah studi mengenai hubungan antara pertumbuhan ekonomi atau peningkatan output dalam pengurangan akangka kemiskinan menghasilkan suatu dasar kerangka pemikiran yang bisa dijadikan patokan bagi pengambil kebijakan. Dari peertumbuhan ekonomi dalam bentuk peningkatan kesempatan kerja atau pengurangan pengangguran dan peningkatan upah/ pendapatan dari kelompok miskin dapat meningkatkan kesejahteraan. Maka dari itu ada mekanisme yang diperlukan untuk memfasilitasi langkah-langkah tersebut agar menghasilkan keuntungan pertumbuhan ekonomi kepada kelompok miskin, pertumbuhan ekonomi menjadi suatu alat yang efektif bagi pengurangan kemiskinan.

4. Beberapa Indikator Kesenjangan dan Kemiskinan

Untuk mengukur kemiskinan, ada tiga indicator yang di perkenalkan oleh (Foster, 2001), yang sering digunakan didalam studi empiris (Che Mat et al., 2012). Pertama, presentase dari populasi yang hidup di dalam keluarga dengan pengeluaran konsumsi perkapita dibawah garis kemiskinan. Kedua, menggambarkan dalamnya kemiskinan disuatu wilayah yang diukur dengan Indeks Jarak Kemiskinan (IJK). Ketiga, diukur dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (IKK). Selain itu para peneliti lainnya tertarik pada dua factor lain, yaitu rata-rata besarnya kekurangan pendapatan rakyat miskin dan besarnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan antara rakyat miskin. Yang berarti, factor-faktor lain tidak berubah, tambah tinggi rata-rata besarnya kekurangan pendapatan rakyat miskin tambah besar gap pendapatan antar rakyat miskin dan kemiskinan juga tambah besar.

5. Kesenjangan dan Kemiskinan di Indonesia

Tingkat kemiskinan antar Negara berbeda, itu disebabkan oleh kondisi social, ekonomi, demografi, politik, kelembagaan, dan kebijakan yang berbeda. Studi terdahulu memperlihatkan bahwa Negara Indonesia dalam periode tahun 1990 kemiskinannya meningkat akibat krisis ekonomi 1997/1998, dan peningkatan tersebut lebih besar di perkotaan dari pada di pedesaan. Hal ini karena ekonomi perkotaan yang didominasi oleh sektor-sektor non pertanian yang sangat tergantung pada impor, modal asing, dan hutang luar negeri lebih dipukul oleh krisis tesebut dibandingkan ekonomi pedesaan yang didominasi oleh sektor pertanian yang lebih tergantung pada sumber-sumber daya produksi dalam negeri. Selain angka kemiskinan, indikator lain yang dapat digunakan sebagai dasar guna melihat kondisi kemiskinan disuatu negara adalah tingkat kelaparan atau jumlah anak yang kurang gizi (Tisniwati, 2012).

Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pendapatan rata-rata perkapita di Indonesia dapat mengalami suatu peningkatan yang pesat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan tersebut juga memberi suatu kontribusi yang besar terhadap pengurangan kemiskinan yang terjadi tiap tahun apalagi masa pandemic covid-19. Selain tingkat kemiskinan, ada dua hal lain yang juga harus diperhatikan dalam membahas kemiskinan di Indonesia, kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan. Semakin besar nilai kedua indeks ini di Indonesai, akan mencerminkan semakin seriusnya persoalan kemiskinan (Zurisdah, 2017).

Selain itu, variasi dalam perubahan kemiskinan antar provinsi di Indonesia juga disebabkan oleh perbedaan antar provinsi dalam banyak hal, seperti laju pertumbuhan ekonomi dan sifatnya, struktur ekonomi, kondisi infrastruktur, tingkat keparahan krisis yang dialami oleh ekonomi provinsi, dan juga implementasi di tingkat provinsi dari program-program anti kemiskinan, khususnya pada masa krisis, dari pemerintah pusat. Keberhasilan suatu pembangunan ekonomi tidak dapat hanya diukur dari laju pertumbuhan output atau peningkatan pendapatan secara agregat atau perkapita saja tetapi banyak indokator yang dapat digunakan.

6. Kebijakan Anti-Kemiskinan

Kebijakan anti-kemiskinan dan distribusi pendapatan mulai muncul sebagai salah satu kebijakan yang sangat penting dari lembaga-lembaga dunia. Pada tahun 2000, Bank Dunia muncul dengan suatu kerangka kerja analisis yang baru untuk memerangi kemiskinan yang di bangun di atas tiga pilar, pemberdayaan, keamanan, dan kesempatan. Menurut Asian Developmen Bank (1999), ada tiga pilar dari suatu strategi guna menurunkan angka kemiskinan (Tarmidi, 1999):

1. Pertumbuhan berkelanjutan yang pro-kemiskinan
2. Pengembangan social yang terdiri atas pengembangan sumber daya manusim, modal social, perbaikan status dari perempuan, dan perlindungan social
3. Manajemen ekonomi makro dan pemerintahan yang baik, yang dibutuhkan untuk mencapai keberhasilan.

C. Implikasi Globalisasi dan Kemiskinan Di Indonesia

Implikasi globalisasi untuk tiap negara dan masyarakat tidak sama, meskipun ada kecenderungan memiliki kemiripan. Letak geografis dan daya resistensi suatu negara dan masyarakat agaknya dapat mempengaruhi implikasi. Karenanya, derajat keterpengaruhan globalisasi antar negara dan masyarakat juga bisa berbeda. Sesuai dengan fokus pembahasan maka implikasi hanya dipusatkan pada pengalaman dan realitas yang terjadi di Indonesia.

Untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi agar legitimasi kekuasaan rezim yang berkuasa pada era pemerintahan Joko Widodo tidak goyah maka penanaman modal asing dipermudah dengan membuat berbagai kebijakan. Persyaratan untuk menanamkan modal dibuat lebih ringan dan lunak. Modal asing mengalir terus terutama dari Negara Cina. Kegiatan industri meningkat tajam. Kerjasama (join) pengusaha pribumi dengan pengusaha asing semakin banyak dilakukan. Kerjasama perusahaan modal asing dengan perusahaan pribumi tidak hanya dalam perdagangan tetapi juga dalam industri strategis. Permasalahnnya adalah, apakah kerjasama itu dapat menguntungan bagi Negara Indonesai dalam menurunkan angka kemiskinan. Yang jelas beberapa perusahaan milik non-pribumi bekerjasama dengan penguasa menjadi perusahaan raksasa (konglomerasi). Secara makro dapat dirasakan bahwa pertumbuhan ekonomi meningkat dan ini banyak menjadi kekaguman berbagai negara yang menanamkan modalnya di Indonesia. Tetapi belum signifikan memberikan dapak bagi penurunan angka kemiskinan, serta masih adanya diskriminasi yang terjadi khusunya untuk tenaga kerja yang berasal dari Indonesai untuk bekerja di perusahaan tersebut.

Masalah lain yang muncul justru perusahaan-perusahaan pribumi yang tidak mampu bersaing dengan modal asing cukup banyak maka perusahaan-perusahaan kecil milik pribumi banyak yang bangkrut dan gulung tikar. Kehancuran industri kecil tidak hanya melanda industri tekstil, tetapi juga industri minuman tradisional. Banyak industri minuman tradisional bangkrut karena tidak mampu bersaing dengan industri minuman modern, seperti *Coca Cola, Seven Up, greensand*. Demikian juga, industri kecil pedesaan yang memproduksi alat rumah tangga memanfaatkan bahan dasar dari tanah dan bambu banyak gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan produk industri modern plastik. Beberapa ada yang mampu bertahan dengan melakukan diversifikasi dan meningkatkan kualitas produk, meskipun ada yang mampu bertahan, tetapi kondisi sangat memperihatinkan (Assiyah, 2008).

Kehancuran industri tradisonal ini juga ada kaitan dengan perubahan dari *stile* hidup masyarakat menuju pada *stile* hidup modern yang tergoda oleh bujuk rayu promosi dan iklan di media yang begitu gencar di masa globalisasi ini. Mereka yang daya beli cukup, cenderung meniru *stile* hidup

yang sering dipromosikan di media (TV) atau iklan lewat internet. Ekspansi pasar dan mengalirnya modal asing diikuti dengan masuknya pekerja asing ke Indonesia. Tentunya ini berimplikasi pada menyempitnya peluang kerja bagi pekerja Indonesia Di samping itu, para pekerja asing ini umumnya dibayar dengan standard gaji masing-masing negara. Gaji pekerja asing dengan pekerja Indonesia berbeda cukup jauh bisa 10 atau 15 kali lebih besar gaji pekerja asing (Setiawan, 2015).

Memang era globalisasi ini telah membuka peluang pekerja Indonesia bekerja di luar negeri. Pada awalnya pekerja Indonesia hanya bekerja di Timur Tengah, tetapi kemudian mereka bekerja di berbagai negara. Menurut catatan Departemen Tenaga Kerja, pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri tercatat 964.111 pekerja terdiri dari perempuan 628.972 dan laki-laki 335.139 pekerja (Yuniarto, 2016). Sumbangan mereka pada devisa negara pasti ada tetapi data akurat jumlah devisa dari pekerja migran ini sulit didapatkan. Namun pendapatan yang dikirimkan ke kampung halaman mereka dapat memberikan sumbangan bagi perbaikan ekonomi keluarga. Meskipun masih sangat terbatas para pekerja tersebut dapat memberikan sumbangan bagi penanggulangan kemiskinan bagi masing-masing keluarga.

Perubahan paling penting dengan arus globalisasi adalah diperluasnya peran pasar keuangan dunia. Lebih dari trilyunan dollar per hari dijual dalam transaksi jual beli mata uang. Pialang-pialang mata uang kaliber dunia dengan leluasa dan dalam tempo yang singkat dapat menjual dan membeli mata uang satu negara. Transaksi mata uang yang demikian cepat telah membawa implikasi bagi sistem moneter suatu negara.

Ada dua implikasi akibat adanya globalisasi dan dampak dari covid-19. *Pertama*, angka pengangguran terbuka meningkat karena banyak pekerja di sektor industri, konstruksi, perdagangan dan jasa terpaksa ke luar dan berusaha mencari kerja di sektor lain yang selama ini hanya mengandalkan tenaga serta kena PHK. *Kedua*, angka setengah pengangguran meningkat karena sebagian dari mereka masuk ke sektor pertanian dan sektor informal yang sebagian besar dikelola oleh keluarga. Mereka bekerja dengan jam kerja tidak menentu serta sering tidak dibayar dan bila diupah biasanya upahnya rendah.Pekerja yang terpaksa kembali ke desa tidak mustahil menambah angka setengah pengangguran karena kemungkinan mendapatkan pekerja penuh (*full time*) cukup sulit di perdesaan. Masalah ketenagakerjaan ini semakin runyam karena selama krisis akibat pandemic covid-19 ribuan pekerja yang selama ini bekerja di Malaysia dan Singapura serta Negara-negara lainnya dipulangkan ke daerah asal (Ihza, 2020).

D. Padandangan Islam Terhadap Globalisasi dan Kemiskinan

Di berbagai negara, reformasi muncul karena keterbukaan informasi yang mereka dapatkan dari internet. Dengan teknologi informasi masyarakat hampir di seluruh dunia diuntungkan dengan mudahnya komunikasi dan bertukar berita, saling berhubungan, dan juga membangun apa yang disebut sebagai "solidaritas dunia maya"

Dalam sejarah Islam, pada masa Rasulullah SAW, globalisasi sebenarnya sudah terjadi, saat itu sudah menjadi hal yang biasa ketika Nabi maupun para sahabat melakukan perniagaan ke luar negeri seperti ke Mesir, Syam, Irak, Yunani, Turki, dan Spanyol. Salah satu bukti yang memperkuat sejarah tersebut yakni di dalam Alquran terdapat banyak ayat-ayat yang relevan dengan tema globalisasi, diantaranya: (Q.S. Al-Hujurat 13)

Artinya: "Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal." (Q.S. Al-Hujurat 13)

Artinya: "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." (Q.S. Al-Qasas 77).

Mengacu pada ayat tersebut tersebut, dalam menghadapi globalisasi ekonomi, umat Islam tidak harus mengganti semua aspek dari globalisasi ekonomi dengan hal-hal yang sama sekali baru dan otentik dari Islam. Umat Islam hanya perlu menunggangi sistem yang sudah ada namun sambil mewarnainya dengan khazanah keislaman agara dapat mengatasi kemsikinan yang terjadi. Dengan demikian, Islam tidak perlu bersikap konfliktual atau pertentangan sempurna terhadap globalisasi ekonomi yang membawa dampak buruk, bahkan globalisasi juga membawa dampak baik bagi sendi kehidupan manusia, namun hanya perlu masuk dan mengubah beberapa prinsip yang tidak sesuai dengan syariah islam yang sejauh ini tidak menjadi perhatian.

Islam mengatur kehidupan umat, membimbing dan menuntun manusia dalam berupaya mencari dan mengelola perekonomian dalam rangka mengentaskan kemiskinan, untuk mencapai tujuan utama, yaitu kemaslahatan fi ad-dunya wa al-akhirah. Terdapat empat pondasi filosofi pembangunan ekonomi dari ajaran pokok Islam yaitu:(Muala, 2020)

a. Tauhid, meletakkan dasar hubungan Allah SWT dengan manusia (habl min Allah), dan manusia terhadap manusia lainya (habl min an-nas) sebagai landasan ekonomi;
b. Rububiyah, mengenal dan memahami dasar hukum Allah, dan selanjutnya menjadikannya sebagai barometer pembangunan ekonomi yang bernafaskan Islam. Konsep rububiyah berarti meyakini bahwa Allah sebagai penguasa tunggal yang menciptakan peraturan, memelihara, menjaga dan mengarahkan kehidupan seluruh makhluk ke arah kesempurnaan.
c. Khalifah, menunjukkan kedudukan dan peran manusia sebagai wakil Allah di muka bumi, dan tanggungjawab sebagai Muslim dan anggota dari umat manusia. Konsep khilafah menempatkan manusia selaku khalifah yang bertanggung jawab sebagai pelaksana amanah Allah di seluruh bidang kehidupan, baik bidang akhlak, ekonomi, politik, sosial, ideologi danprinsip organisasi sosial. Dari konsep ini lahirlah pengertian tentang perwalian, norma, politik, serta prinsip organisasi sosial lainnya;
d. Tazkiyah, misi utama utusan Allah SWT untuk menyucikan manusia agar mampu menjalin hubungannya dengan Allah SWT, sesamanya, alam lingkungannya, masyarakat dan negara. Konsep ini menuntun manusia membangun dirinya sendiri, dan dapat membangunkan semua dimensi kehidupan, termasuk dimensi ekonomi. Hasil akhirnya adalah falaḥ, yaitu kesejahteraan kehidupan di dunia dan akhirat.

Globalisasi ekonomi merupakan pertumbuhan sangat cepat dalam transaksi barang dan jasa, hak kepemilikan, perdagangan dan investasi, dan aktivitas ekonomi lainnya baik di ranah makro dan mikro. Globalisasi Ekonomi sarat dengan ideologi liberalisme dan kapitalisme dengan pelaku utama sektor swasta yaitu perusahaan transnasional. Sedangkan karakter dari globalisasi ekonomi sendiri adalah internasionalisasi produksi, model pembagian kerja baru secara internasional, migrasi baru dari kawasan selatan ke utara, terciptanya lingkungan kompetitif yang mempercepat proses, dan menginternasionalnya bangsa-bangsa untuk menjadi agen global.(Muala, 2020)

Konsep ekonomi yang diajukan Islam adalah ekonomi yang bertujuan sesuai maqasid syariah, yaitu memenuhi kelima maslahat pokok (al-ḍaruriyat al-khams) agar segala kebutuhan dasar terpenuhi, demi terpeliharanya keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut terdapat langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam menggerakkan ekonomi berbasis Islam, yaitu: menghidupkan faktor kemanusiaan, mengurangi konsentrasi kekayaan, meingkatkan sejehateraan dengan mengurangi tingkat kemiskinan, restrukturisasi ekonomi, restrukturisasi keuangan. Semua langkah tersebut harus dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam. (Fadlan, 2010)

KESIMPULAN

Globalisasi ini mengidentifikasikan bahwa integrasi ekonomi, ekspansi pasar memberikan sedikit peluang untuk penanggulangan kemiskinan. Namun beberapa fakta mengindikasikan bahwa globalisasi mempunyai kecenderungan menyebabkan terjadinya de-industrialisasi dan memicu krisis ekonomi yang kemudian diikuti dengan munculnya gejala pengangguran, baik pengangguran terbuka maupun setengah pengangguran. Memang, masih terbuka peluang kerja di sektor informal tetapi kurang dapat memberikan kepastian penghasilan. Dalam kondisi yang demikian banyak penduduk terdorong ke dalam situasi ketidakpastian penghasilan dan terpuruk ke dalam kemiskinan. Ini

mengisyaratkan bahwa sampai saat ini globalisasi cenderung menghambat dari pada menciptakan peluang penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, globalisasi termasuk ekspansi pasar perlu diimbangi dengan liberalisasi politik sehingga masyarakat mampu memperjuangkan hak-hak dan menolak segala sesuatu yang dianggap merugikan mereka.

Jebakan ekspansi dan kemajuan pasar perlu dilawan dengan menyadarkan masyarakat melalui upaya pembatasan perilaku konsumtif sehingga mereka tidak terpuruh dalam kemiskinan serta lebih mendalami ilmu keagamaan agar apa yang mereka dapatkan bisa berkah. Masyarakat perlu diberi informasi secara benar perlunya melakukan efisiensi terhadap pendapatan yang sudah mereka terima dengan meningkatkan saving agar mereka bisa hidup layak dan terbebas dari kemiskinan serta mereka terbebas dari dampak globalisasi yang negative tarutama pada masa pandemic covid-19.

REFERENCES

Assiyah, R. (2008). *Potensi dan pengembangan wisata desa Ngablak di Sleman Yogyakarta*.

Che Mat, S. H., Abdul Hakim, R., & Jumali, S. N. (2012). Indeks kemiskinan pelbagai dimensi sebagai alternatif pengukuran kemiskinan: Kajian kes di daerah Baling, Kedah. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, *46*(1), 3–12.

Fadlan, F. (2010). KONSEP PEMBANGUNAN EKONOMI BERBASIS ISLAM (Sebuah Upaya Pembangunan Ekonomi Indonesia yang Adil, Makmur, dan Sejahtera). *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, *5*(2), 257–274.

Hasan, M., & Azis, M. (2018). *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. CV. Nur Lina Bekerjasama dengan Pustaka Taman Ilmu.

Idris, K., Syaparuddin, S., & Hodijah, S. (2014). Pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja, kemiskinan dan ketimpangan pendapatan di Provinsi Jambi. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, *9*(1).

Ihza, K. N. (2020). Dampak Covid-19 Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)(Studi Kasus Umkm Ikhwa Comp Desa Watesprojo, Kemlagi, Mojokerto). *Jurnal Inovasi Penelitian*, *1*(7), 1325–1330.

Muala, A. (2020). Reposisi Ekonomi Islam di Era Globalisasi Perspektif Maqashid Syari'ah. *JIL: Journal of Islamic Law*, *1*(1), 45–63.

Munir, S., & Ilham, L. (2022). THE RIGHTS OF FREEDOM ASSOCIATION AFTER CHANGES A COMMUNITY ORGANIZATION LAW IN INDONESIA. *JURNAL SETIA PANCASILA*, *2*(2), 67–75.

Nur, A. C., Akib, H., & Niswaty, R. (2022). *EKSISTENSI ADMINISTRASI PUBLIK PADA ARUS GLOBALISASI*. Badan Penerbit UNM.

Rahman, M. Z. A., Mohamad, M. T., & Azzis, M. S. A. (2022). Indeks Kemiskinan Multidimensi Global: Analisis Menurut Perspektif Maqasid Syariah (Global Multidimensional Povety Index: An Analysis According to Maqasid Syariah Perspectives). *UMRAN-International Journal of Islamic and Civilizational Studies*, *9*(1), 1–22.

Setiawan, R. I. (2015). Persepsi tenaga kerja lokal pada invasi tenaga kerja asing di Indonesia: Tantangan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015. *Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi (KOMPILEK)*, *7*(2), 202–218.

Sodik, T. (2022). *FUNGSI PTPN VII DALAM MENINGKATKAN EKONOMI KELUARGA DESA REJOMULYO KECAMATAN TANJUNG BINTANG KABUPATEN LAMPUNG SELATAN*. UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

Tarmidi, L. T. (1999). Krisis moneter Indonesia: Sebab, dampak, peran IMF dan saran. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, *1*(4), 1–25.

Tisniwati, B. (2012). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *10*(1), 33–46.

Yuniarto, P. R. (2016). Masalah globalisasi di Indonesia: Antara kepentingan, kebijakan, dan tantangan. *Jurnal Kajian Wilayah*, *5*(1), 67–95.

Zurisdah, Z. (2017). *Pengaruh Tingkat Pengangguran terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di provinsi Banten*. Universitas Islam Negeri" Sultan Maulana Hasanuddin" BANTEN.